

SKRIPSI

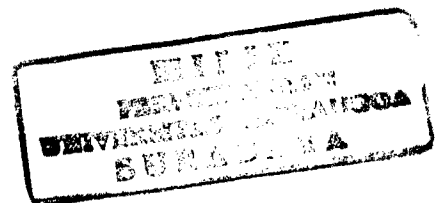
**PERTANGGUNGJAWABAN KPUD DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
LANGSUNG**



Tat 09/05
Soe
p

MARIA ELIZABETH ALICIA .C. SOEWOTO
030115212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PERTANGGUNGJAWABAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG**

SKRIPSI

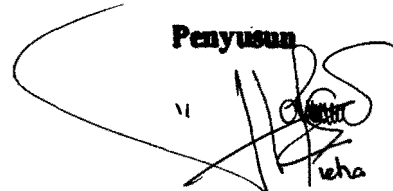
**Diajukan sebagai penulisan Akhir untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Sukardi S.H. M.H
NIP. 131 855 885

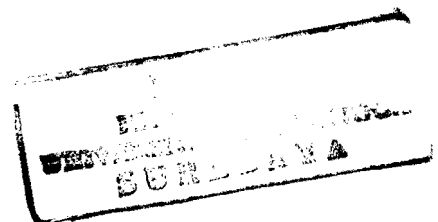
Penyusun



Maria Elizabeth Alicia C. Soewoto
NIM. 030115212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

- a. Bahwa pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini kepada publik. Yang dimana KPUD melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. DPRD hanya menerima laporannya dan tidak berhak untuk memutuskan menerima atau menolak laporan dari KPUD tersebut. DPRD melanjutkan ke Gubernur dan oleh Gubernur dilanjutkan ke Mendagri, setelah di Mendagri ini sudah bersifat final.
- b. Bahwa pengelolaan keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini berasal dari APBD. KPUD tidak bertanggungjawab dalam mengeluarkan dana tersebut. Pengeluaran dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bertanggungjawab kepada APBD.

II. Saran

- a. Agar dana yang dikeluarkan oleh APBD dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun untuk anggaran-anggaran lain.
- b. Agar dengan hasil penetapan pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan itu, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Dan masyarakat tidak merasa dibodohi dalam penggunaan dana tersebut.